

**PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM  
DI KALIMANTAN SELATAN**

**(Studi Terhadap Artikel  
Pada Harian Banjarmasin Post  
dan Kalimantan Post Tahun 2000-2004)**

**Tesis**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Kewajiban Akademik  
Guna Mencapai Gelar Magister dalam  
Ilmu Pendidikan Islam**

**Oleh**

**Ahmad Juhaiddi  
NIM. 000 201 0125-P**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ANTASARI  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI FILSAFAT ISLAM  
KONSENTRASI PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM  
BANJARMASIN  
2007 M/1428 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Juhaidi  
NIM : 000.201.0125-P  
Tempat, Tgl. Lahir : Padang Batung, 18 Februari 1976  
Program Studi : Filsafat Islam  
Konsentrasi : Pemikiran Pendidikan Islam

menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul "Pemikiran Pendidikan Islam Di Kalimantan Selatan (Studi Terhadap Artikel pada Harian Banjarmasin Post dan Kalimantan Post Tahun 2000-2004)" adalah benar-benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sebelumnya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, Agustus 2007.

Saya membuat pernyataan,

  
Ahmad Juhaidi

## PENGESAHAN TESIS

PEMIKIRAN PENDIDIKAN ISLAM DI KALIMANTAN SELATAN  
(Studi Terhadap Artikel Pada Harian Banjarmasin Post  
dan Kalimantan Post Tahun 2000-2004)

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN

Ahmad Juhaidi  
NIM. 000 201 0125-P

Telah Diujikan pada Dewan Penguji  
Pada Rabu, 22 Agustus 2007

### DEWAN PENGUJI

- |    | Nama                                           |
|----|------------------------------------------------|
| 1. | Prof. Dr. H. Asmarin AS, M.A.<br>(Ketua)       |
| 2. | Dr. Ahmad Khairuddin, M.Ag.<br>(Anggota)       |
| 3. | Prof. Dr. H. Kamrani Buseri, M.A.<br>(Anggota) |
| 4. | Drs. H. Ridhahani, M.Pd.<br>(Anggota)          |

1.   
2.   
3.   
4. 

Mengetahui,  
Direktur



  
Prof. Dr. H. Asmarin AS, M.A.  
150216638

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا  
ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.

Segala puji dan syukur bagi Allah swt., yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Saya merasa berbalas sekali mendapat kesempatan untuk mengekspresikan rasa terima kasih yang teramat mendalam kepada Prof. Dr. H. Kanti Huseini, M.A. dan Drs. H. Ridhahani, M.Pd., pembimbing penulisan tesis ini, atas semua saran dan petunjuk yang tiada henti dan penuh kesabaran tidak hanya terkait langsung dengan tesis ini tetapi juga bimbingan yang telah mereka dalam kajian pendidikan Islam.

Selain mereka berdua, saya menyadari bahwa dalam melakukan penelitian ini telah banyak mendapat bimbingan dan dukungan tanpa kenal lelah dan penuh kesabaran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, saya juga ingin menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Asmaran AS, M.A. selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Antasari dan jajarannya serta seluruh dosen yang telah banyak membantu dalam proses pendidikan di PP IAIN Antasari. Tanpa bantuan dan pengajaran mereka, saya mungkin tak mampu meningkatkan pengetahuan tentang pendidikan Islam.

2. Kepala dan staf Perpustakaan IAIN Antasari yang selalu dengan ramah dan senyum memberikan informasi terkait literatur yang telah memperkaya tesis ini.
3. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan tesis ini.

Tentu saja, tulisan ini tak akan pernah selesai tanpa motivasi dari my beloved Dewi Sarastuti dan bidadari kecil kami, Nasywa F. Huwaida. Meski sederhana, tesis ini tetap kupersentahkan untuk kalian berdua.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi semua. Amin ya rabbal 'alamin.

Banjarmasin, Rajab 1428 H.  
Juli 2007 M.

Penulis

## ABSTRAK

**Ahmad Juhaiddi.** *Pemikiran Pendidikan Islam di Kalimantan Selatan (Studi Terhadap pada Surat Kabar Harian di Banjarmasin).* Di bawah bimbingan Prof. Dr. H. Kamruddin Buseri, M.A. dan Drs. H. Ridhahani, M.Pd. Tesis, Pada Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2007.

Pemikiran pendidikan Islam yang berkembang di Kalimantan Selatan dapat dilihat dari tulisan yang dikemukakan para ahli. Pemikiran yang lebih komprehensif dapat ditemui dalam buku-buku mereka. Akan tetapi, telaah terhadap buku tersebut tidak dapat dilakukan karena buku-buku tersebut mewakili kalangan perguruan tinggi saja. Oleh karena, tesis ini melihat lebih jauh pemikiran pendidikan terutama yang terkait dengan kurikulum dan guru yang muncul dalam artikel di koran harian di Banjarmasin sejak tahun 2000 sampai 2004. Hal itu berdasarkan asumsi tulisan di surat kabar harian merupakan karya dari kalangan yang lebih luas. Tesis ini ingin menjawab dua buah pertanyaan: Apa pemikiran pendidikan mengenai kurikulum dan guru yang dikemukakan dalam artikel tersebut dan bagaimana kecenderungan tipologi pemikiran pendidikan dalam media di Kalimantan Selatan. Tipologi yang digunakan adalah tipologi model M. Jawwad Ridla tentang tiga aliran utama dalam pendidikan Islam yaitu agamis konservatif (*al muhafidz*), religius rasional (*al dini al aqlani*), dan aliran pragmatik (*al dzarai'i*). Tesis ini berbentuk penelitian kualitatif. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis isi dengan pendekatan filsafat pendidikan Islam. Pemikiran pendidikan yang muncul adalah mengenai orientasi pendidikan yaitu pendidikan budi pekerti, mencetak pemimpin dan memberdayakan, relevan dengan dunia usaha, zaman, dan lokal, serta pendidikan keluarga; tanggung jawab pendidikan, kurikulum, dan guru. Khusus mengenai kurikulum, ide yang berkembang adalah keinginan kurikulum terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman dan peserta didik, menghilangkan dikotomi ilmu umum dan mengembangkan kreativitas peserta didik. Persoalan

|                                                                       |      |
|-----------------------------------------------------------------------|------|
| DAFTAR ISI .....                                                      | viii |
| DAFTAR TABEL .....                                                    | xii  |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                                                 | xi   |
| <b>BAB I    PENDAHULUAN</b>                                           |      |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                       | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....                                              | 12   |
| C. Alasan Memilih Judul .....                                         | 13   |
| D. Tujuan Penelitian .....                                            | 13   |
| E. Telaah Pustaka .....                                               | 14   |
| F. Metode Penelitian .....                                            | 17   |
| G. Sistematika Penulisan .....                                        | 17   |
| <b>BAB II    SEKILAS TENTANG BANJARMASIN POST DAN KALIMANTAN POST</b> |      |
| A. Surat Kabar Harian .....                                           | 22   |
| B. Profil Banjarmasin Post dan Kalimantan Post .....                  |      |
| 1. Banjarmasin Post .....                                             | 24   |
| 2. Kalimantan Post .....                                              | 25   |

|        |                                                 |     |
|--------|-------------------------------------------------|-----|
| BAB IV | KERINCI LAMUDAN GURU (DESKUSI DAN INTERPRETASI) |     |
| A.     | Kurikulum                                       | 62  |
| 1.     | Dikotomi Pendidikan                             | 66  |
| 2.     | Pengembangan Kurikulum                          | 83  |
| B.     | Guru                                            |     |
| 1.     | Kualitas Guru                                   | 101 |
| 2.     | Kemajiteraan Guru                               | 116 |
| C.     | Tipologi Pemikiran Pendidikan                   |     |
| 1.     | Tipologi Rida                                   | 119 |
| 2.     | Pemikiran di Kalimantan Selatan                 | 123 |
| BAB V  | PENUTUP                                         |     |
| A.     | Simpulan                                        | 126 |
| 1.     | Pemikiran yang Muncul                           | 126 |
| 2.     | Tipologi                                        | 126 |
| B.     | Saran                                           | 127 |
|        | DAFTAR PUSTAKA                                  | 129 |
|        | LAMPIRAN-LAMPIRAN                               | 137 |
|        | DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS                    | 144 |

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam banyak pengertian pendidikan dapat disimpulkan menuju satu hal yaitu peningkatan kualitas manusia. Pendidikan diartikan sebagai proses pengembangan pengetahuan dan karakter serta sikap hidup pada diri manusia/bangsa dalam arti etuk.<sup>1</sup> Bagi Freire pendidikan merupakan upaya untuk mengembalikan fungsi manusia agar terhindar dari berbagai bentuk penindasan, kebodohan, sampai ketertinggalan.<sup>2</sup> Dengan demikian, pendidikan dilaksanakan untuk membebaskan manusia dari berbagai persoalan hidup yang dihadapinya sehingga manusia akan menjadi makhluk yang bermartabat.

Lebih jauh, pendidikan dapat difungsikan sebagai penggerak perubahan sosial, pusat modernisasi, dan pusat seleksi kearah perubahan struktur sosial suatu masyarakat. Pendidikan dalam posisi itu merupakan refleksi kritis terhadap sistem yang tengah berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan membentuk manusia yang dapat memberikan kontribusi bagi manusia menuju tercapainya hakikat kehidupannya.

---

<sup>1</sup> Lihat V. B. Mangarajana, *Insan dari Yogyakarta* (Jakarta: Kompas, 2003).  
St. Sularto (ed), h.129.

<sup>2</sup> Paulo Freire, *Politik Pendidikan, Kebudayaan, Kekayaan, dan Pembangunan*.  
Penj. Agung Prihanuyo dan Agung Arif Firdiyarano. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,  
2002) h.12-13.

Demikian juga, dengan pendidikan Islam. Pendidikan Islam merupakan perwujudan dari spirit Islam dan penanaman/pemunculan-kembangan ajaran-ajaran Islam.<sup>3</sup> Menurut Zakiah Daradjat, pendidikan Islam pada intinya adalah sebagai wahana pembentukan manusia berakhlak mulia.<sup>4</sup> Aspek akhlak (spiritual) itu terungkap pula dalam hasil konferensi Pendidikan Islam se-Dunia sebagaimana dikutip Kamrani Buseri berikut.

*Education should aim at holistic growth of the total personality of man through the training of man spirit, intellect, the rational will, feelings and bodily senses. Education should therefore cater for the growth of man in all aspects: spiritual, intellectual, imaginative, physical, scientific, linguistic, both individually and collectively and motivate all of these aspects towards goodness and the attainment of perfection. The Ultimate aim of Moslem education lies in the realization of complete submission to Allah on the level of individual the community and humanity at large.<sup>5</sup>*

Dalam pendidikan Islam, pendidikan telah mendapat perhatian sejak wahyu pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad saw.

أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ اقْرَأْ وَرَبُّكَ  
الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

"Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah, Yang mengajar manusia dengan pena, mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya." (QS. al-Alaq : 1-5).

<sup>3</sup>Muhammad, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h.22.

<sup>4</sup>Zakiah Daradjat, *Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ruhana, 1995), h.67.

<sup>5</sup>Kamrani Buseri, *Antologi Pendidikan Islam dan Tindakan Pendidikan Tentera Praktis Kuantan*, (Yogyakarta: UII Press, 2013), h. (29-130).

Dalam wahyu pertama tersebut, tidak disebutkan apa saja yang harus dibaca karena Alquran mengingatkan manusia membaca apa saja selama *himi Rohrik*, bermanfaat bagi manusia. *Iqra'* berarti bacalah, telitilah, dailamilah, ketahuilah ciri-ciri sesuatu, hoesiah alam, tanda-tanda zaman, sejarah, maupun di-i sendiri.

Firman Tuhan tersebut juga mengisyaratkan bahwa dua cara perolehan dan pengembangan ilmu yaitu Allah mengajarkan dengan pena yang telah diketahui manusia lain dan mengajar manusia apa yang belum diketahui. Cara pertama mengajai atas usaha manusia, itulah pendidikan. Cara kedua dengan mengajar tanpa usaha dan alat, Wahyu, ilham, intuisi, dan firasat adalah beberapa bentuk tanpa *qalam*.<sup>6</sup>

Uraian tentang pendidikan dapat merujuk kepada komponen pokok pendidikan. Filsafat pendidikan Islam menguraikan pendidikan menjadi beberapa komponen pokok yaitu tujuan pendidikan Islam, kurikulum, pendidik, peserta didik, metode, dan lingkungan pendidikan.<sup>7</sup> Tanpa mengabaikan komponen yang lain, persoalan pendidik (selanjutnya di sebut guru) dan kurikulum merupakan komponen yang sering menjadi sorotan. Hal itu disebabkan oleh kedudukan keduanya yang bersinggungan langsung dengan praktik pendidikan.

Dalam konteks Indonesia, pada awal abad ke-20 kurikulum pendidikan terpecah menjadi dua bentuk, yaitu pendidikan yang diberikan

<sup>6</sup>M. Quraish Shihab, *Memahami Alquran*, (Mizan: Bandung, 2003), h. 441.

<sup>7</sup>Muhammad, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, (Pustaka Petajar Yogyakarta, 2003) : 28.

oleh sekolah-sekolah Barat (Belanda) yang sekuler dan pendidikan di pesantren.<sup>9</sup> Senada dengan itu, Wirjosukarto melihat bahwa pada masa itu pendidikan terbagi atas corak lama yang berpusat di pesantren dan corak baru di perguruan-perguruan, (sekolah) yang didirikan oleh Belanda.<sup>10</sup>

Muhaimin yang mengutip Wirjosukarto menjelaskan bahwa pendidikan corak lama lebih berorientasi kepada menyiapkan calon kiai yang menguasai ilmu agama semata, kurang memperhatikan pengetahuan untuk hidup sehari-hari, pengetahuan umum tidak diajarkan, dan mengisolasi diri dari pemerintah kolonial. Bertolak belakang dengan itu, pendidikan corak baru sangat menonjolkan intelek, bersikap negatif terhadap agama Islam, dan terasing dari kehidupan bangsa Indonesia.<sup>11</sup>

Pendidikan pesantren lebih mengutamakan ilmu agama antara lain pengajaran Alquran dan pada tingkat lanjut diberikan pengajian kitab (aqidah, hadis, tafsir, fiqh, tasawuf, hadis, serta hisab) dengan diawali pelajaran mengenai nahwu.<sup>12</sup> Steenbrink juga menginformasikan tentang pendidikan Belanda waktu itu. Menurutnya pendidikan Belanda berpusat pada ilmu pengetahuan dan keterampilan dunia, sedangkan pendidikan

<sup>9</sup>A. Mokli Ali, *Memahami Indonesia Aspek Aspek Islam* (Bandung: Mizan, 1991), h.193.

<sup>10</sup>Amir Hamzah Wirjosukarto, *Pembaharuan Pendidikan dan Perguruan Islam* (Jember: Mufid Offset, 1985), Cet. IV, h.47.

<sup>11</sup>Muhaimin, *op.cit.*, h.70.

<sup>12</sup>Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Modernitas, Sekolah - Pendidikan Islam dalam Kurun Modern* (Jakarta: LPJFS, 1986), Cet. II, h.18-20.

Islam (pesantren) menekankan pada pengetahuan dan keterampilan agama.<sup>12</sup>

Selain dua pendidikan yang sama sekali berbeda itu, bahkan bertentangan itu, adapula pendidikan corak ketiga yang mencoba membuat sintesis dari corak lama (pesantren) dan corak baru (kolonial). Representasi corak ketiga tersebut dapat dilihat dari Madrasah/Sekolah Adabiyah di Padang. Syekh H. Abdullah Ahmad (1878-1933) dan lembaga pendidikan Muhammadiyah K. H. Ahmad Dahlan (1868-1923).

Sekolah/Madrasah Adabiyah mengajarkan berbagai ilmu umum layaknya sekolah Belanda tetapi ditambah dengan pelajaran agama dan Alquran. Pada tahun 1916, sekolah Adabiyah merupakan sekolah Islam pertama yang diakui dan menerima subsidi dana serta bantuan guru dari pemerintah kolonial.<sup>13</sup> Kurikulum di lembaga-lembaga pendidikan milik Muhammadiyah yang dinamakan Pondok Muhammadiyah (berdiri 3 Desember 1921) mengajarkan pelajaran umum dan pendidikan agama. Inti dari kurikulum sekolah dan madrasah Muhammadiyah adalah pendidikan moral pendidikan individu, dan pendidikan kemasyarakatan.<sup>14</sup>

Setelah kemerdekaan sampai akhir tahun 1960-an, pendidikan agama masih bertumpu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 jo. Nomor 12 Tahun 1954 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran Sekolah. Kurikulum pendidikan 1973 tidak hanya meliputi pelajaran

<sup>12</sup>Ibid., h. 24.

<sup>13</sup>Muhaimin, *op.cit.*, h. 33.

<sup>14</sup>Amir Hamzah Wirjokusarto, *Op.cit.*, h. 33.

agama semata-mata tetapi juga mata pelajaran umum dan mata pelajaran kejuruan. Pada tahun 1978, Departemen Agama memberlakukan Kurikulum 1976 yang kemudian disempurnakan dengan Kurikulum 1984.<sup>13</sup>

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tampaknya menjadi dasar dalam mengubah madrasah. Dalam undang-undang tersebut, madrasah tidak lagi didefinisikan sebagai sekolah agama tetapi berubah menjadi sekolah umum berciri khas Islam. Konsekuensinya, madrasah pun harus mengubah kurikulumnya menyesuaikan diri sebagai sebuah sekolah umum. Pada tahun 1994, Departemen Agama menetapkan kurikulum baru yang jamak dikenal sebagai Kurikulum 1994.

Dalam kurikulum tersebut terdapat perbedaan mendasar jumlah jam pelajaran umum dan agama. Jika dalam kurikulum sebelumnya pelajaran umum hanya mendapat porsi 70% dan 30% pelajaran agama, dalam kurikulum 1994 madrasah diwajibkan menyelenggarakan sepenuhnya 100% pelajaran umum sebagaimana di sekolah-sekolah umum.

Setelah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum pun mengalami perubahan. Sejak tahun 2004, Kurikulum Berbasis Kompetensi digunakan dalam segala tingkat/jenjang pendidikan. Kurikulum Berbasis Kompetensi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam

---

<sup>13</sup>M. Ali Haasir dan Mukti Ali, *Kepita Cakara Pendidikan Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2003), h. 54-55).

pengembangan kurikulum sekolah.<sup>46</sup> Peraturan Presiden No.7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009 menyebutkan bahwa kurikulum baik nasional maupun lokal harus disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni serta perkembangan global.

Pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi serta efisiensi manajemen pendidikan. Pemerataan kesempatan pendidikan diwujudkan dalam program wajib belajar 9 tahun. Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya melalui olahhati, olahpikir, olah rasa dan olahraga agar memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global. Peningkatan relevansi pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan berbasis potensi sumber daya alam Indonesia. Peningkatan efisiensi manajemen pendidikan dilakukan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah dan pembaharuan pengelolaan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Implementasi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan, yaitu:

---

<sup>46</sup>Suko Rahadi, "Kurikulum Berbasis Kompetensi", <http://www.puskas.or.id> 23/07/2006

## B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dicari jawabannya dalam penelitian ini adalah:

1. Apa pemikiran pendidikan mengenai kurikulum dan guru yang dikemukakan dalam artikel tersebut?
2. Bagaimana kecenderungan tipologi pemikiran pendidikan dalam media di Kalimantan Selatan?

## C. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang mendorong penelitian ini dilakukan:

1. Media massa cetak sangat mempengaruhi cara pandang publik terhadap pendidikan Islam. Jika dibandingkan dengan buku, pendapat, ide, pemikiran mengenai pendidikan dalam media massa dikemukakan oleh kalangan yang lebih beragam.
2. Pada periode 2000-2004 merupakan periode di mana terjadi dua perubahan penting di Indonesia yaitu masa awal orde reformasi dan otonomi daerah. Pada periode itu, paling tidak merupakan awal tiga perubahan penting bagi bangsa Indonesia yang diyakini juga berpengaruh terhadap pendidikan yaitu diberlakukannya UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 25 tentang Pembagian Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, serta UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

**PENDIDIKAN DALAM WACANA POPULER****A. Sekitar Artikel Pendidikan dan Penulisnya**

Persoalan pendidikan yang menjadi tema pokok artikel opini di *Banjarmasin Post* dan *Kalimantan Post* berjumlah 50 buah. Artikel-artikel tersebut ditulis oleh empatpuluh tiga orang. Itu berarti ada seorang penulis menulis lebih dari satu artikel pendidikan. Bila dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin penulis, artikel opini ditulis oleh lima orang penulis perempuan (11,63 %) dan tigapuluh delapan (88,4 %) penulis lelaki.

Para penulis tersebut mayoritas berprofesi sebagai orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan. Penulis yang berprofesi sebagai guru delapan belas orang (41,9 %), dosen enam orang (13,95 %), praktisi pendidikan (pemilik lembaga pendidikan) dua orang (4,65 %), mahasiswa enam orang (13,95 %), dan budayawan / pemerhati sebelas orang (25,6 %).

**B. Tema Pokok Artikel Opini**

Dalam rentang tahun 2000 sampai 2004, tulisan mengenai pendidikan yang dimuat pada kolom opini harian *Banjarmasin Post* dan *Kalimantan Post* dapat diklasifikasikan dan digambarkan sebagai berikut.

## 1. Orientasi Pendidikan

### a. Pendidikan Budi Pekerti

Pendidikan bangsa Indonesia yang dilaksanakan dalam suasana bangsa menghadapi krisis multi dimensi antara lain maraknya korupsi, kolusi, nepotisme, ekonomi yang belum stabil, konflik sosial, dan krisis nilai moral merupakan tantangan bagi pendidikan. Salah satu upaya mengatasi hal tersebut adalah dengan memberikan pendidikan budi pekerti secara dini. Berkenaan dengan itu, Alipir Budiman melihat bahwa aspek moral atau budi pekerti merupakan hal terpenting dalam pendidikan dasar.<sup>1</sup> Lebih jauh, pendapat lain terungkap bahwa pendidikan semestinya diarahkan agar peserta didik menjadi manusia yang berbudi pekerti, bermoral, dan memiliki kemampuan dalam membaca alam sekitarnya. Dengan kemampuan tersebut bukan hanya menjadi manusia yang berguna bagi diri sendiri tapi juga bermanfaat di masyarakat.<sup>2</sup>

Bagi Akhilar Hamdi, pendidikan keagamaan dan budi pekerti harus mendapat porsi yang tepat dan digalakkan kembali. Dengan demikian, menurutnya, akan muncul keseimbangan antara perkembangan jasmani dan pertumbuhan rohani karena tanpa adanya keseimbangan itu dapat dipastikan perkembangan generasi akan timpang. Jika hanya mengejar ilmu pengetahuan dan teknologi semata, nilai moral akan merosot.<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Alipir Budiman, "Desain Kurikulum Madrasah Tsanawiyah", *Kalimantan Post*, 26 September 2000, h. 4.

<sup>2</sup>Syaekani, "Memuliskan Guru", *Kalimantan Post*, 2 Juni 2002, h. 4.

<sup>3</sup>Akhilar Hamdi, "Pendidikan Moral Salah Satu Syarat Pendidikan Nasional", *Kalimantan Post*, 21 Jun, 2001 h. 4.

Mengenai penanaman budi pekerti di rumah dapat dilakukan melalui contoh dan suri tauladan dari orang tua kepada anak-anaknya. Nilai-nilai budi pekerti yang perlu ditanamkan adalah

Amal saleh, amanah, antisipatif, baik sangka, bekerja keras, beradab, berani berbuat benar, berani memikul resiko, berdisiplin, berhati lapang, berhati lembut, beriman dan bertakwa, berinisiatif, berkemauan keras, berpikis jauh ke depan, bersahaja, bersemangat, bersifat konstruktif, bersyukur, bertanggung jawab, bertanggung rasa, bijaksana, cerdas, cermat, demokratis, dinamis, efisien, empati, gigih, hemat, ikhlas, jujur, ksatria, komitmen, kooperatif, kosmopolit, kreatif, kukuh hati, lugas, mandiri, manusiawi, mawas diri, mencintai ilmu, menghargai karya orang lain, menghargai kesehatan, menghargai pendapat orang lain, mengabdikan waktu, patriotik, pemaaf, pemurah, pengabdian diri, produktif, rajin, ramah, rasa indah, rasa sayang, rasa keterikatan, rasa malu, rasa memiliki, percaya diri, rela berkorban, rendah hati, sabar, semangat kebersamaan, setia, siap mental, sikap adil, sikap hormat, sikap nalar, sikap tertib, sopan santun, sportif, suaila, taat asas, takut bersalah, tangguh, tawakal, tegas, tekun, tepat janji, terbuka, dan ulet.<sup>4</sup>

Selain itu, sikap negatif yang harus dihindari adalah

Anti resiko, bidab, bohong, buruk sangka, congeng, ceroboh, curang, dengki, egois, feodalistik, fitnah, gila hormat, gila kekuasaan, ingkar janji, jorok, kasar, kedaerahan, keras kepala, kesukuan, ketergantungan, khianat, kikir, konsumtif, kufur, lalai, licik, lupa diri, malas, maha bodoh, materialistik, melecehkan, mementingkan golongan, mengganggakan, mengganjing, menyalahgunakan, memekahkan, murah percaya, mudah tergoda, mudah terpengaruh, munafik, otoriter, penarah, peribenci, pencemooh, pendendam, pengecut, perusak, pesimis, provokatif, putus asa, rendah diri, ria, sekuler, serakah, sombong, takabur, tergesa-gesa, dan tertutup.<sup>5</sup>

Akan tetapi, Bedjo berpendapat bahwa harus ada konsep utama yang disampaikan kepada peserta didik. Mengutip Durkheim, Bedjo berpendapat disiplin sebagai unsur utama pendidikan moral dan diikuti

<sup>4</sup>Sugianto, "Pendidikan Budi Pekerti", *Rajawarman Post*, 21 Desember 2001, h.20.

<sup>5</sup>Ibid.

dengan aktivitas yang impersonal dan otosemi pribadi. Selain itu, mengutip Kohliberg, Bedjo beranggapan pula bahwa keadaan sebagai inti permasalahan pendidikan moral.<sup>6</sup>

Pendidikan harus dipandang sebagai gejala permintaan yaitu mempersoalkan untuk apa lulusan itu dihasilkan. Selama ini, masyarakat ingin mendapatkan ijazah dengan cara mudah dan murah. Akibatnya bukan sekali terjadi ditemuan "ijazah aspal" (asli tapi palsu). Oleh karenanya, pendidikan seharusnya melakukan perubahan orientasi dari *scholastic learning* ke *learning, skill ke competence*, *reject curriculum ke flexible curriculum* dengan penanaman pada pematangan akhlak, budi pekerti dan karakter, penguasaan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan humaniora serta meningkatkan minat baca tulis.<sup>7</sup>

Pendapat lain mengungkapkan bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, pendidikan semestinya diarahkan kepada pembentukan karakter bangsa atau kepribadian yang dilakukan sejak anak usia dini pada usia prasekolah dan sekolah dasar. Pembentukan karakter bangsa sejak dini dengan sasaran antara lain terwujudnya keimanan dan ketakwaan yang kukuh dan ini justru merupakan landasan utama bagi masyarakat madani sehingga terciptalah sikap toleransi sesama manusia.

<sup>6</sup>Bedjo, "Pergerakan Pendidikan Moral di Sekolah", *Banjarmasin Post*, 8 Februari 2003, h. 18.

<sup>7</sup>Darali Rahman "Sistem Pendidikan Kita Segera Diperbaharui", *Banjarmasin Post*, 17 September 2002, h. 20.

yang berbeda.<sup>8</sup> Dengan kalimat lain, Sakdiah berpendapat bahwa ocmiasi pendidikan adalah membentuk jiwa / agamaan anak yang direkayasa oleh orang tuanya.<sup>9</sup>

Pendidikan formal hanya mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa diimbangi penanaman nilai-nilai keluhuran martabat manusia, hanya melahirkan generasi yang memiliki rasio tanpa hati nurani, anak-anak bangsa yang pandai bersolek namun tidak mengenal batas etika kewajaran, anak-anak bangsa yang memiliki IQ tinggi namun apatis terhadap lingkungan sekitarnya. Akibat lebih lanjut, sering terjadi keberhasilan anak secara akademik tidak diikuti oleh kesuksesan secara moral. Yang terjadi adalah semakin maraknya rawan antarpelajar, kasus narkoba, dan pornografi. Oleh karena itulah, menurut Kurnain, pentingnya pendidikan keimanan pada anak sejak dini, sebab pendidikan keimanan tersebut, dapat dijadikan landasan moral untuk bertindak dan berbuat di masa-masa akan datang.<sup>10</sup>

Hal tersebut menyinalir hal tersebut terkait erat dengan mental kapitalistik yang tercermin dari betapa bangganya para orang tua jika anak-anaknya jago matematika dibandingkan terampil menguasai sastra apalagi agama. Logikanya jenas dengan menguasai matematika si anak

<sup>8</sup>Soegeng Santono, "Pendidikan Anak Usia Dini dan Karakter Bangsa", *Benjarmasin Post*, 9 Oktober 2002, h.20.

<sup>9</sup>Halimasari Sakdiah, "Implementasi Pendidikan terhadap Perkembangan Jiwa Keagamaan Anak", *Kalimantan Post*, 14 Juli 2002, h.4.

<sup>10</sup>A. Kurnain MGI, "Pendidikan Iman Kapan Dimulai", *Kalimantan Post*, 30 April 2004, h.4.

diharapkan kelak menguasai teknologi canggih yang bisa digunakan sebagai mesin untuk mencetak benda, uang kekayaan.<sup>11</sup>

Senada dengan pendapat di atas, Syakrani beranggapan bahwa pendidikan harus diarahkan agar peserta didik menjadi manusia yang berbudi pekerti, bermoral, dan memiliki kemampuan dalam membaca alam sekitarnya.<sup>12</sup>

#### b. Mencetak Pemimpin dan Memberdayakan

Orientasi pendidikan lain yang terungkap adalah pendidikan diharapkan dapat mencetak pemimpin. Salah satu konsen utama pendidikan adalah menyiapkan orang-orang untuk menjalankan dan memimpin institusi.<sup>13</sup>

Pendidikan juga diharapkan mampu memberdayakan manusia. Visi pendidikan adalah menjadikan manusia sebagai basis utama atau titik sentral. Untuk itu, menurut Ridha, perlu rekonstruksi secara mendasar tentang kerangka pandang filosofis tentang manusia.<sup>14</sup>

Dalam kerangka otonomi daerah, Muhammad Nurdin mengungkapkan bahwa reorientasi kebijakan sekolah itu seharusnya melibatkan berbagai komponen pendidikan dalam wadah komite sekolah.

<sup>11</sup>Hatmansyah, "Pendidikan Kita Terjebak Kapitalisme", *Banjarmasin Post*, 10 November 2002, h. 10.

<sup>12</sup>Syakrani, "Memuliskan Guru", *Kalimantan Post*, 1 Juni 2002, h. 4.

<sup>13</sup>A. Fach Syuhud, "Diperlukan Pendidikan Pencetak Pemimpin", *Banjarmasin Post*, 2 Juni 2004, h. 20.

<sup>14</sup>Muhammad Ridha, "Pendidikan Dalam Perspektif Pemberdayaan", *Banjarmasin Post*, 2 Juni 2004, h. 20.

dengan mengacu pada *stakeholder*.<sup>12</sup> Kemajuan pendidikan, menurut Nurdin, sangat ditentukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Oleh karenanya, kepala dinas tersebut harus berasal dari dunia pendidikan dan mempunyai komitmen memajukan pendidikan.<sup>13</sup>

### c. Relevansi dengan Dunia Usaha, Zaman, dan Lokal

Dalam tulisan yang berbeda terungkap keinginan pendidikan dapat punya relevansi dengan dunia usaha atau lapangan kerja. Hal itu dilakukan dengan adanya pengembangan keterampilan dan keahlian secara langsung dalam pendidikan sehingga dapat berguna dalam dunia kerja dan industri. Dengan kata lain, hasil pendidikan hendaknya sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam kehidupannya. Nahed mengistilahkan hal tersebut dengan kalimat tidak hanya sekedar mengetahui sesuatu tetapi juga dapat melakukan sesuatu (*learning dan doing*).<sup>14</sup> Seperti disebut pula dalam berbagai literatur, Marwani berpendapat bahwa pendidikan dengan empat pilar pendidikan. Menurutnya, empat pilar pendidikan untuk pendidikan masa depan adalah *learning to be*, belajar adalah berlaku sepanjang masa, *learning to do*, yakni pendidikan untuk berbuat, *learning to know*, pendidikan untuk mengetahui segala sesuatu, dan *learning to live together*, manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial.<sup>15</sup>

<sup>12</sup>Muhammad Nurdin, "Das Tahun Pendidikan dalam Kerangka Qimmi Daerah", *Banjarmasin Post*, 14 Oktober 2002, h. 20.

<sup>13</sup>*Ibid*

<sup>14</sup>Nahed Nowsairah, "Pembangunan Pendidikan Nasional", *Banjarmasin Post*, 11 Juni 2004, h. 20.

<sup>15</sup>Muhammad Marwani, "Kurikulum Masa Depan dengan Empat Pilar Pendidikan Kesejahteraan", *Kalimantan Post*, 8 Juli 2002, h. 4.

Tidak berbeda jauh dengan itu, Chairin Subhi mengemukakan bahwa orientasi pendidikan bukan hanya semata-mata untuk mencerdaskan anak didik secara kognitif oleh guru, lebih dari itu adalah mematangkan mental atau jiwa anak sehingga menjadi anak dewasa yang mampu menghadapi tantangan jaman.<sup>19</sup>

Tidak jauh berbeda dengan pendapat di atas, Sutikno beranggapan bahwa pendidikan bukan hanya diorientasikan pada penguasaan teoritik semata dan lebih mengedepankan verbalitas tetapi lebih pada menumbuhkan kreativitas.<sup>20</sup> Yunus, juga sependapat dengan Sutikno. Menurutnya proses belajar tidak hanya menerima, mengumpulkan, dan menghafal sejumlah informasi tetapi harus dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan bertindak kreatif.<sup>21</sup>

Marwani menjelaskan lebih jauh tentang itu. Orientasi pendidikan lebih kepada menumbuhkan sikap kreatif dalam menghadapi sesuatu yang diistilahkannya dengan pendidikan humanis. Menurutnya ada lima pilar dalam pendidikan humanis, yakni partisipasi, integrasi, relevansi, pribadi anak didik dan tujuan.<sup>22</sup>

<sup>19</sup>Chairin Subhi, "Profil Guru di Era Otonomi Sekolah", *Kalimantan Post*, 8 April 2004, h.4.

<sup>20</sup>Sutikno, "Tuntutan Profesionalisme Guru dalam Menyongsong KBK", *Kalimantan Post*, 23 Nopember 2002, h.4.

<sup>21</sup>Achmad Yunus, "Pengembangan Kreativitas Melalui Proses Belajar Mengajar", *Kalimantan Post*, 2 Oktober 2000, h.4.

<sup>22</sup>Muhammad Marwani, "Pendidikan Humanis: Perlu Mewarnai Pembelajaran di Sekolah", *Kalimantan Post*, 21 Mei 2002, h.4.

Dalam konteks otonomi, pendidikan juga perlu berorientasi kepada pengetahuan lokal. Masykuri menyebutkan bahwa dalam era otonomi daerah, orientasi pendidikan bukan hanya penguasaan ilmu pengetahuan secara nasional akan tetapi juga penguasaan ilmu pengetahuan lokal.<sup>24</sup>

#### d. Pendidikan Keluarga

Pendidikan tidak hanya dilakukan di lembaga sekolah/madrasah tetapi pendidikan di keluarga perlu juga untuk dicermati. Saatnya pendidikan keluarga menjadi perhatian semua pihak, sebab dari keluargalah cikal bakalnya sejak dan maknanya masyarakat dan aman dan tentramnya negara. Tantangan dunia modern yang pelik dan penuh kompetensi maka salah satu solusinya back to keluarga sebagai dasar bagi pendidikan anak.<sup>25</sup>

Pendapat lain yang senada dengan hal tersebut adalah apa yang diungkapkan Faisal. Menurutnya pendidikan harus diarahkan sejak dini dan dimulai dari keluarga. Oleh karenanya, keluarga harus memahami akan pentingnya pendidikan bagi anak sehingga moral anak akan terhindar dari kecuratan.<sup>26</sup>

#### 2. Tanggung Jawab Pendidik.

Pendapat yang dominan mengemukakan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab bersama. Dalam sistem manajemen berbasis

<sup>24</sup>H. Masykuri, "Kerit Guru yang Kelabu", *Kahumanan Post*, 14 Juli 2004, h.4.

<sup>25</sup>Gazali Rahman, "Pendidikan Keluarga: Perluasan Disiplin (Refleksi) Memperingati Hari Keluarga Nasional", *Kahumanan Post*, 28 Juni 2004, h.4.

<sup>26</sup>Umar Faisal, "Peranan Pendidikan Bagi Anak", *Kahumanan Post*, 22 Juli 2004, h.4.

sekolah (MBS) segala keputusan diambil dari keputusan bersama yang terdiri dari siswa, guru, kepala sekolah, LSM, dewan sekolah, dunia usaha, tokoh masyarakat, wakil rakyat, dan dunia pers.<sup>26</sup>

Di lain pihak, pendidikan juga terkait erat dengan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pendidikan di sekolah akan berhasil jika didukung oleh keluarga dan peserta didik berada di masyarakat yang peduli pendidikan. Proses pertumbuhan dan perkembangan seorang anak akan di matangkan dan diujikan dalam kehidupan dan pergaulan dalam masyarakat.<sup>27</sup>

Tampaknya peran sekolah, guru, dan komite sekolah dianggap sangat menentukan. Hamid berpendapat mereka itu merupakan rangkaian kekuatan yang sangat integral dalam konteksnya dengan *school based management*. Sekolah dipersilakan untuk membuat dan menyusun program yang jelas dan tepat sebagai upaya meningkatkan mutu pendidikan ke depan. Lebih jauh Hamid menjelaskan mutu pendidikan dimaksud antara lain menyangkut mutu kepala sekolah, guru, proses pembelajaran, dan mutu *out put*.<sup>28</sup>

### 3. Kurikulum

#### a. Pengembangan Kurikulum

Pemikiran-pemikiran dalam surat kahar cenderung mengeritik kurikulum. Kurikulum masih perlu dibenahi bila dikaitkan dengan

<sup>26</sup> Haris Fadillah, "Pendidikan Tanggung Jawab Siapa?", *Banyarmasin Post*, 10 September 2011, h. 20.

<sup>27</sup> Edi Kismudo, "Pendidikan Tanggung Jawab Bersama", *Banyarmasin Post*, 15 September 2011, h. 20.

<sup>28</sup> Abdul Hamid, "Program Bimbingan Meningkatkan Mutu Pendidikan", *Banyarmasin Post*, 20 September 2014 h. 20.

perkembangan zaman. Akhtiar Hamdi (2001) beranggapan bahwa dalam pendidikan harus seimbang antara pendidikan keagamaan dengan pendidikan ilmu umum.<sup>29</sup>

Kurikulum pesantren pun masih dikritik. Aliman Syahrani (2002) mengungkapkan bahwa sangat sulit diterima pesantren dalam bentuk umumnya yang sekarang dianggap sebagai sarana yang akan menghantarkan orang menjadi pintar. Lebih jauh, Aliman menjelaskan bahan-bahan kajian yang dikuliahkan di pesantren sebenarnya sudah banyak yang "basi" bila dihadapkan dengan tuntutan zaman seperti dewasa ini.

Aliman menulis "dalam pondok pesantren, umumnya, masih menekankan kepada para santri cuma dijejali dengan muatan kajian kitab kuning yang menyuguhkan pikiran *terpoe doelan*. Apa yang telah terserap dari kitab kuning cenderung dipertahankan mati-matian sebagai satu struktur hukum tak terbantah".<sup>30</sup>

Santri, menurutnya, adalah manusia bijak yang bergelut dengan fikih masa lalu. Dia mencontohkan manakala dihadapkan dengan sistem komputerisasi yang bisa membantu kita dalam melakukan perhitungan praktis dan *word processor*, dilibatkan dalam arena diskusi tentang industri pesawat, reaktor nuklir, kegiatan matahari yang bisa mempengaruhi medan magnet bumi yang akhirnya mempengaruhi kualitas

<sup>29</sup> Akhtiar Hamdi, "Pendidikan Musti Salah Satu Standar Pendidikan Nasional", *Kahumanan Pust.*, 21 Juni 2001, h. 2.

<sup>30</sup> Aliman Syahrani, "Pesantren Vs Darul", *Kahumanan Pust.*, 4 Februari 2002, h. 4.

penerimaan gelombang radio, mereka hanya bisa pigrit jari. Padahal teknologi itu tidak terlepas dari keseharian. Fenomena ini sungguh sangat ironis dari pesantren yang masih menberlakukan pola kurikulum kuno.<sup>10</sup>

Pendidikan di Indonesia yang masih terjebak dalam dikotomi pendidikan sekuler dan pendidikan agama, menurut Hafiz, sangat penting bagi sekolah-sekolah Islam adalah penerapan pendidikan agama yang mencakup pengetahuan secara teoritis dalam hal ilmu agama akan tetapi juga penguasaan iptek karenanya penerapan pendidikan iptek dan integ menjadi sesuatu yang penting untuk diterapkan.<sup>11</sup>

Terkait dengan hal, perubahan kurikulum merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Kurikulum, menurut Marwani, semestinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa mengabaikan kondisi dan nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia.<sup>12</sup>

Tampaknya pendapat Hamdi dan Syahrani itu menginginkan perubahan kurikulum dalam semua jenis pendidikan. Dalam kerangka otonomi daerah, Syaifuddin (2000) mengemukakan upaya pengembangan kurikulum diberikan porsi yang lebih besar kepada pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah pusat hanya bertugas membuat kurikulum standar nasional (*minimum basic competencies*), daerah kabupaten/kota yang menjabarkan dan menerjemahkan kurikulum itu ke dalam visi misi.

<sup>10</sup>Ibid.

<sup>11</sup>Hafiz Al Ansyari, "Mencari Sistem Pendidikan yang Relevan", *Kolomunian Post*, 20 Maret 2004, h. 4.

<sup>12</sup>Muhammad Marwani, "Kurikulum Masa Depan SLTP dan SMU/SMK dengan Berbasis Kompetensi Dai 21", *Kolomunian Post*, 16 Februari 2002, h. 4.

tujuan, dan pokok-pokok bahasan utama yang diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan dengan mengakomodasi tuntutan kontekstual lokal.<sup>38</sup>

Hal itu kemudian tergantung kemampuan pihak kabupaten/kota terutama guru dalam menerjemahkan kurikulum standar nasional dengan memperhatikan kondisi lokal. Nana Syaodih Sukmadinata yang dikutip Syafruddin Nurdin (2005) beranggapan bahwa guru punya peran yang sangat penting dalam penyusunan kurikulum maupun pelaksanaan kurikulum. Salah satu indikator keberhasilan guru di dalam pelaksanaan tugas adalah kemampuannya menjabarkan, memperluas, menciptakan relevansi kurikulum dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi.<sup>39</sup>

Senada dengan itu Jamaluddin menekankan pentingnya peran guru dalam proses pembelajaran yang merupakan bagian dari pengisian kurikulum. Guru adalah ujung tombak dari kurikulum, karena guru secara kualitas dan kuantitas harus mendapat perhatian sehingga tujuan utama dari pembelajaran dapat tercapai.<sup>40</sup>

Terlepas dari persoalan tersebut, Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dianggap sebagai langkah positif dalam dunia pendidikan. Rahayu Rahmi melihat kurikulum sebelumnya punya peran dalam menciptakan model pendidikan yang penuh persaingan siapa yang kuat dialah yang

<sup>38</sup>Syafruddin Sabda, "Paradigma Pengelolaan Pendidikan dalam Perspektif Desentralisasi", *Banjarnan Post*, 3 Mei 2000, h. 1.

<sup>39</sup>Syafruddin Nurdin, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, (Jakarta: Ciputat Pers, 2005) h. 68.

<sup>40</sup>Jamaluddin Nasrullah, "Pendidikan di Era Otonomi Daerah", *Kalimantan Post*, 6 Maret 2002, h. 4.

menang. Dalam kondisi demikian, peserta didik cenderung memiliki perasaan negatif terhadap sekolah, guru, dan teman sekolahnya. Dalam benak mereka, sekolah adalah arena pertarungan, guru adalah pemberi label "pandai", "sedang", atau "bodoh", dan teman sekolah dianggap musuh yang harus dikalahkan dalam belajar.<sup>17</sup>

Pendapat lain yang senada bahwa penekanan kurikulum tidak hanya pada aspek pengetahuan saja tetapi juga harus mampu menumbuhkan kreativitas dan kemandirian adalah pendapat Alfian. Menurut Alfian, pola pendidikan yang lebih menekankan penguasaan pengetahuan semata sudah saatnya dirombak menjadi sebuah model kurikulum yang mampu menumbuhkan kreativitas dan sikap mandiri sehingga pada gilirannya terbentuk pribadi-pribadi yang pekerja keras dan memiliki martabat diri untuk berdiri atas kemampuan dan usaha sendiri.<sup>18</sup>

Dalam konteks otonomi pendidikan, menurut Gazali (2000) sistem pendidikan di Kalimantan Selatan armentinya *back to basic* kepada sistem pendidikan Islam, terintegrasinya ilmu-ilmu umum dengan ilmu-ilmu agama sehingga menghasilkan pendidikan yang terintegrasi antara otak dengan hati, antara logika dengan etika. Tidak ada lagi pemisahan/sekularisasi/dikotomi antara pendidikan umum yang dibina oleh Diknas dengan pendidikan agama yang dibina oleh Depag. Hanya ada satu

<sup>17</sup>Rahayu Rahni, "Darwinisme dalam Pendidikan Formal", *Banjarmasin Post*, 30 Juni 2004, h.20.

<sup>18</sup>Alfian, "Mendobrak Dogmatisme Pendidikan", *Kalimantan Post*, 14 April 2004, h.4.

pendidikan yang integral/kaffah meskipun bisa saja pembina jurusan aqliyah oleh Diknas dan jurusan naqliyah oleh Depag.<sup>39</sup>

### b. Materi Pelajaran

Mengenai materi pelajaran di lembaga pendidikan terutama pada tingkat SMA/MA dinilai masih terjadi tumpang tindih. Menurut Muhdi Abdullah, mata pelajaran PPKN yang diberikan sejak kelas I sampai kelas III dan Sosiologi pada kelas II dan III, serta Antropologi dan Sejarah membahas tentang dinamika masyarakat. Oleh karenanya, menurut Abdullah, perlu dipikirkan penggabungan mata pelajaran menjadi satu. Dengan demikian akan menghemat anggaran pemerintah dan efisiensi tenaga guru. Pembelajaran empat mata pelajaran itu pun dapat dilakukan dalam satu aula.<sup>40</sup>

Penggabungan beberapa bidang ilmu menjadi satu bidang saja harus berdasarkan landasan epistemologi yang kuat. PPKN, Sosiologi, Anthropologi, dan Sejarah berada dalam satu rumpun ilmu sosial namun objek bahasan berbeda. PPKN jelas lebih berorientasi pada sikap nasionalisme Indonesia. Sosiologi, Anthropologi, dan Sejarah pun juga mempunyai orientasi bahasan ilmu yang berbeda-beda. Dengan demikian, dalam sudut pandang filsafat ilmu penggabungan mata pelajaran tersebut menjadi satu akan memunculkan kerancuan.

<sup>39</sup>A. Gazali, "Sistem Pendidikan Islam di Abad Kembaran", *Harajurrahman Press* 29 September 2001, h.7.

<sup>40</sup>Muhdi Abdullah, "Ebtanas SMA Perlu Ditinjau Kembali", *Harajurrahman Press* 1 Februari 2000, h.7.

Alipir Budiman melihat kurikulum madrasah seharusnya lebih menekankan kepada etika, moral, dan budi pekerti. Dia berpendapat bahwa pelajaran muatan lokal seperti *nahwu* atau bahasa Arab pada madrasah tingkat dasar atau tsanawiyah sebaiknya diganti dengan pendidikan budi pekerti.<sup>41</sup>

Dalam perspektif yang lain, Arifin melihat bahwa materi pendidikan harus bertolak dari Surah Luqman yang menekankan kepada lima hal yaitu tauhid, bakti kepada orang tua, menegakan salat, akhlak mulia, dan kesederhanaan.<sup>42</sup>

#### 4. Guru

Persoalan guru merupakan tema yang menarik untuk diperbincangkan. Apabila membicarakan mengenai guru ada dua hal yang selalu menjadi tema sentral di Kalimantan Selatan yaitu kualitas guru dan kesejahteraan guru.

##### a. Kualitas Guru

Kualitas guru dalam wacana populer masih sering dikritik. Ditilik dari kualifikasi, guru di lingkungan Departemen Agama masih belum menggembirakan. Sebanyak 60% guru madrasah (MI, MTs, dan MA)

<sup>41</sup>Alipir Budiman, "Senah Kurikulum Madrasah Tsanawiyah", *Kalimantan Post*, 26 September 2001, h. 4.

<sup>42</sup>Mansur Arifin, "Pendidikan Anak Dalam Surah Luqman", *Kalimantan Post*, 21 Maret 2002, h. 4.

mengajar tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikannya dan dari seluruh guru hanya 20% yang layak dari segi kualifikasi pendidikannya.<sup>43</sup>

Kualitas guru yang masih rendah tersebut juga tercermin dari kemampuan mereka dalam hal penulisan karya ilmiah. Apalagi guru TK, SD/MI, atau SMP/MTs yang mayoritas berpendidikan SPG/KPG/PGA/Diploma. Danipaknya, mereka sangat sulit untuk mencapai jenjang kepangkatan setingkat IV/A.<sup>44</sup>

Sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 Tahun 1993 dan Kepala BAKN Nomor 0433/1993 dan Nomor 25/1993 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, seorang guru yang akan memasuki jenjang kepangkatan IV diwajibkan mengembangkan profesi yang terdiri dari:

1. Membuat karya tulis ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survey, dan evaluasi.
2. Membuat makalah yang berisi tinjauan atau ulasan ilmiah.
3. Membuat tulisan ilmiah populer dan dimuat di koran atau majalah yang dipublikasikan secara luas.
4. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah yang disampaikan pada pertemuan ilmiah.
5. Membuat buku pelajaran atau modul.

<sup>43</sup>Abdul Hamid, "Bagaimana Upaya Peningkatan Mutu Guru", *Banjarmasin Post*, 8 September 2004, h.20.

<sup>44</sup>Hamdani, "Pengembangan Profesi Guru", *Banjarmasin Post*, 20 Oktober 2001, h.20.

6. Membuat karya terjemahan dan diklat lainnya yang bermanfaat bagi pendidikan.

Sistem kenaikan pangkat semacam itu, menurut Hamdani, ilarat memaksa seseorang untuk menyetir mobil padahal dia tidak pernah berlatih untuk menyetir dan tidak pernah memiliki SIM untuk menyetir. Yang lebih ironis lagi mereka yang juga kurang pengetahuan/pengalaman menyetir menilai orang lain menyetir mobil.<sup>45</sup>

Guru yang berkualitas menurut Subhi setidaknya memenuhi kriteria:

(1) memiliki kualifikasi pendidikan profesi yang memadai, (2) memiliki kompetensi keilmuan sesuai dengan bidang yang ditekuni, (3) memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan anak didiknya, (4) mempunyai jiwa kreatif dan produktif, (5) mempunyai etos kerja dan komitmen tinggi terhadap profesinya, dan (6) selalu mengembangkan diri secara terus menerus melalui organisasi profesi, internet, huku-buku, seminar, penataran dan sebagainya. Guru yang profesional tidak lagi hanya sebagai *teacher* (pengajar), melalui juga sebagai *coach* (pelatih), *counselor* (pembimbing), dan *learning manager* (manajer belajar).<sup>46</sup>

Selain itu mempunyai kemampuan mengajarkan ilmu pengetahuan, guru harus punya kemampuan metodologi untuk mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan sebagai sarana penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>47</sup> Guru di samping mengajar juga harus mampu mendidik, mengarahkan, membimbing, melatih dan membina.<sup>48</sup>

<sup>45</sup>*Ibid.*

<sup>46</sup>Chairun Subhi, "Profil Guru di Era Otonomi Sekolah", *Kalimantan Post*, 8 April 2004, h. 4.

<sup>47</sup>Melissa Nur Aisya, "Keterbatasan Eksperimen Pendidikan", *Kalimantan Post*, 1 September 2004, h. 4.

<sup>48</sup>Soprianto, "Membangun Profesi Guru yang Sedang Tergadai", *Kalimantan Post*, 5 Juli 2002, h. 4.

Tampaknya kualitas guru dianggap punya hubungan dengan citra guru di mata masyarakat. Jamaluddin mensinyalir bahwa dalam dunia pendidikan citra guru mengalami penurunan. Dia berpendapat merosotnya citra guru disebabkan oleh:

- a. Implikasi pembangunan nasional dalam bidang pendidikan secara besar-besaran dilakukan sejak awal tahun 70-an menuntut persediaan sarana dan prasarana pendidikan yang tidak tanggung-tanggung. Berdirinya ribuan SD Inpres sejak tahun 1971 berdampak pada tuntutan tersedianya tenaga guru yang tidak sedikit. Ratusan ribu tenaga pendidik dan kependidikan harus diangkat tanpa memperhatikan kualitas mereka.
- b. Kemajuan teknologi menyebabkan sumber informasi menjadi sangat beragam. Bagi guru yang tidak kreatif karena berbagai macam keterbatasan akan tertinggal selangkah dari muridnya.
- c. Masyarakat yang materialistis memandang bahwa menjadi guru secara ekonomis bukanlah profesi yang menguntungkan.<sup>48</sup>

Tidak jauh berbeda dengan hal itu, pendapat lain beranggapan bahwa penyebab guru tidak lagi dianggap sebagai profesi yang luhur dan bergengsi di masyarakat adalah:

1. Guru masih kurang memiliki kemampuan profesional, kurang menguasai materi pelajaran, dan metode pengajaran.
2. Adanya oknum-oknum guru yang melakukan pelanggaran terhadap etika kode etik guru yang memojokkan keseluruhan korps dan citra guru.<sup>49</sup>

Senada dengan Jamaluddin, Yusransyah melihat terpuruknya profesi guru di mata masyarakat terkait dengan masalah ekonomi. Gaji guru

<sup>48</sup>Jamaluddin, "Mengangkat Kembali Citra Profesi Guru", *Banjarmasin Post*, 24 Agustus 2000, h.4.

<sup>49</sup>Abdullah Thalh, "Menjadi Guru yang Efektif dan Kreatif", *Banjarmasin Post*, 17 September 2002, h.20.

dianggap tidak dapat menjanjikan kehidupan yang layak. Bagi Yusransyah, siap menjadi guru berarti siap untuk hidup seadanya.<sup>31</sup>

Anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar jika dilihat dari minat masuk ke pendidikan keguruan (FKIP/Fakultas Tarbiyah/Diploma). Hal itu menunjukkan bahwa profesi guru tidak mengalami penurunan bahkan menjadi primadona. Apalagi jika melihat banyaknya lulusan nonkeguruan mengikuti program profesi akta tenaga kependidikan. Akan tetapi, pendapat tersebut bisa juga dianggap benar jika melihat minat menjadi guru hanya merupakan pilihan terakhir di saat lapangan kerja semakin sulit bagi para sarjana nonkependidikan sedangkan lowongan untuk menjadi guru masih memberi harapan bagi mereka. Orientasi kerja itulah yang punya andil dalam tingginya minat menjadi guru bukan karena guru dianggap profesi yang penuh gengsi sebaning dengan dokter atau pegawai bank.

#### b. Peningkatan Kualitas

Hamid berpendapat peningkatan kualitas guru tersebut dengan melaksanakan program penyetaraan pendidikan bagi guru dan mengoptimalkan peran lembaga diklat. Untuk keterampilan yang sifatnya khusus, dilaksanakan penataran dan melaksanakan pembinaan dan

<sup>31</sup> Muhammad Yusransyah, "Terpusatnya Profesi Guru di Mata Masyarakat", *Kalimantan Post*, 8 Januari 2012, h.4

pengembangan kemampuan profesional guru melalui berbagai kegiatan di kalangan guru, misalnya kelompok kerja guru.<sup>52</sup>

Dalam tulisan lain terungkap bahwa kualitas guru dipengaruhi oleh kepribadian guru, niat dan motivasi, kesiapan dan kemandirian guru, kondisi kehidupan dan lingkungan, dan sarana pendidikan. Kepribadian terkait erat dengan sikap mental dan moral guru itu sendiri. Dengan demikian, guru yang efektif akan memiliki integritas pribadi yang baik. Guru yang efektif harus memiliki watak dan perilaku tertentu yang dapat membawa anak didiknya ke arah tujuan pendidikan yang diinginkan.

Niat dan motivasi seorang guru juga sangat mempengaruhi guru. Keikhlasan dan kereloaan berkorban seorang guru akan memunculkan motivasi kerja yang tinggi. Dengan demikian, akan muncul minat dan kemauan yang besar dari dalam dirinya untuk berbuat yang terbaik dalam pelaksanaan tugasnya tanpa mengharapkan pujian dan sanjungan orang lain.

Faktor lain yang mempengaruhi dalam tulisan itu disebutkan adalah kesiapan dan kemandirian. Kesiapan harus telah dipopuk sejak masih dididik menjadi seorang calon guru sehingga dia akan selalu berupaya memenuhi kebutuhan dalam memenuhi tugasnya. Selain itu, seorang guru juga harus memiliki kemandirian dalam melaksanakan tugas. Artinya guru tidak harus tergantung pada orang lain dalam menjalankan profesinya.

Kondisi kehidupan dan lingkungan guru juga punya andil bagi kemampuan guru. Guru yang hidup dalam kondisi ekonomi yang mapan dan sejahtera paling tidak terjamin ketenangan hidupnya dalam melaksanakan tugas. Faktor lain yang mempengaruhi adalah sarana dan fasilitas pendidikan. Tanpa tersedianya fasilitas dan sarana keefektifan tugas guru belum bisa terwujud sebagaimana yang diharapkan.<sup>53</sup>

Dalam tulisan lain terungkap bahwa upaya mengangkat citra guru yang terpurul, tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) harus membuat terobosan baru akan menghasilkan tenaga siap pakai dengan konsep yang lebih realistis dan komprehensif agar para lulusannya siap menghadapi kenyataan di lapangan. Tentang gaji guru yang sangat terbatas, menurutnya, para guru semestinya tidak menggantungkan diri hanya kepada gaji tetapi guru harus mampu mengatasi berbagai tuntutan hidup keluarga dengan peran yang multi dimensi.<sup>54</sup>

Tentang kualitas guru tersebut juga mendapat sorotan Muhammad Marwani. Menurutnya seorang guru yang profesional adalah guru yang menerapkan atau berlandaskan pada kode etik guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Guru juga harus memiliki ilmu pengetahuan, metode, dan kecekatan yang perlu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Guru profesional yang terus mengembangkan diri akan membuat anak didiknya

---

<sup>53</sup>*Ibid.*

<sup>54</sup>*Ibid.*

mampu menciptakan situasi belajar yang dinamis. Guru semacam itu tidak akan takut pada beban tugas baru yang berat karena kreativitas dan inisiatifnya.<sup>35</sup>

Lebih jauh Marwani mengkritik guru-guru yang mengajarkan materi pelajaran tanpa melihat perubahan dalam masyarakat. Guru, tulisnya, semestinya sadar bahwa pengetahuan beberapa tahun yang lalu, bahkan juga sekarang, bukanlah jaminan bahwa dia sudah menjadi profesional dan bermutu. Profesionalitas seorang guru sangat ditentukan oleh sikap dan cara dia merealisasikan dan memanfaatkan pengalaman dan pengetahuannya dalam melaksanakan tugas sehingga selalu relevan dengan tuntutan perkembangan zaman serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.<sup>36</sup>

#### c. Kesejahteraan Guru

Kesejahteraan guru tampaknya merupakan persoalan yang menarik untuk disoroti. Menurut Syarkawi, masalah kesejahteraan ini seperti lingkaran setan (*vicious circle*) yang tak terpecahkan. Menurutya persoalan kualitas pendidikan, termasuk persoalan kesejahteraan itu akan terpecahkan dengan *budget* yang besar bagi pendidikan.<sup>37</sup>

Ironisnya, tema pendidikan hanya menarik di saat berada dalam wilayah politik. Menurut Dina Hermina persoalan pendidikan, termasuk

<sup>35</sup>Muhammad Marwani, "Peningkatan Kemampuan Profesi Guru Meningkatkan Mutu SDM", *Rangarmasita Pesi*, 27 April 2000, h.4

<sup>36</sup>*Ibid.*

<sup>37</sup>Hasani Syarkawi, "Guru Sejahtera, SDM Mahal", *Rangarmasita Pesi*, 2002, h.4.

gaji guru, selalu menjadi bagian dari tema kampanye peserta Pemilu. Akan tetapi, setelah mereka duduk menjadi anggota DPR maupun MPR mereka membisu seribu basa. Dengan sebuah perumpamaan dia mengibaratkan mereka sebagai kumbang ompong yang kekenyangan. Persoalan pendidikan, guru, seharusnya mendapat perhatian dari pemerintah dan legislatif sehingga guru mendapat fasilitas yang dapat menunjang profesinya.<sup>38</sup>

Ada dua hal yang dapat dilakukan pemerintah terkait dengan keberhasilan pendidikan. Pertama, menciptakan iklim yang baik agar proses belajar-mengajar tetap berjalan dengan normal. Ada kesepahaman pikiran dari pemerintah dan guru untuk saling memberi dan menerima. Pemerintah menaikkan gaji guru dan guru menyajikan pengajaran yang benar-benar mencerdaskan bangsa. Kedua, pemerintah pusat dan daerah memberikan proporsi yang wajar dan adil atas pendapatan guru sehingga kesejahteraan dapat tercapai dengan baik. Dengan demikian, guru tidak lagi mencari mencari penghasilan tambahan.<sup>39</sup>

Mengatasi persoalan-persoalan dalam pendidikan itu tidak cukup dengan tambah sulaam pendidikan tetapi menuntut adanya revolusi pendidikan. Syaifuddin Sabdi berpendapat yang terpenting adalah adanya *political will* terutama pemerintah. *Political will* ini merupakan adanya

<sup>38</sup>Dina Hermina, "Demokrasi dan Pendidikan", *Bangarmasin Post*, 26 April 2000, h. 4.

<sup>39</sup>*Ibid.*

niat dan tekad yang sungguh-sungguh serta tulus dari semua pihak.<sup>48</sup>  
Dengan kata lain, pemerintah harus pendidikan sebagai salah satu prioritas utama dengan menyedikan anggaran yang secukup-cukupnya<sup>49</sup>.

Dengan demikian, pendidikan tidak hanya sebatas komoditas politik pemerintah atau partai politik tertentu saja tetapi niat untuk memajukan pendidikan tanpa *reverse* atau pamrih.

## BAB IV

### KURIKULUM DAN GURU (DISKUSI DAN INTERPRETASI)

#### A. Kurikulum

"Secara bahasa, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *curir* yang berarti pelari dan *currere* yang berarti tempat berpacu atau tempat berlomba sedangkan *curriculum* mempunyai arti jarak yang harus ditempuh oleh pelari."<sup>1</sup>

Saylor dkk. membuat kategori pengertian kurikulum yaitu: *as subjects and subject matter*, *as experiences*, dan *as objectives*.<sup>2</sup> Senada dengan Saylor, jika menelaah definisi kurikulum, definisi itu dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok. Pertama, kurikulum didefinisikan sebagai sejumlah mata pelajaran. Definisi itu terdapat dalam pendapat Robert M. Hutchins yang menyarankan, "*Curriculum should include grammar, reading, theory and logic, and arithmetic, and addition at secondary level introduce the great books of the western world*. Dalam Webster Dictionary (1955) kurikulum didefinisikan juga *a course, especially a specified fixed course of study as in a school or college as one leading to a degree*. Lebih jelas juga tergambar dalam definisi bahwa kurikulum adalah kumpulan silabus yang tercetak atau uraian mengenai

---

<sup>1</sup> Syafruddin Nurdin, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, (Jakarta: LPJES, 2003), h.21.

<sup>2</sup> J. Galen Saylor, W.M. Alexander, Arthur J. Lewis, *Curriculum Planning For Better Teaching and Learning*, (Japan: Holt-Saunders), h. 4-7.

satu demi satu mata pelajaran yang disertai pengantar bersifat umum mengenai tujuan pendidikan secara keseluruhan, dan ikhtisar singkat mengenai tujuan masing-masing mata pelajaran.<sup>3</sup>

Kedua, kurikulum sebagai pengalaman belajar. Definisi ini menganggap kurikulum adalah semua hal yang dilakukan peserta didik di bawah bimbingan dan tanggung jawab guru. Hal itu tergambar dalam pendapat Hollis L. Caswell dan Doak S. Campbell yang menyebutkan bahwa kurikulum adalah *all of the experience children have under the guidance of teacher*. Demikian juga pendapat Dorris Lee dan Murray Lee yang menyatakan kurikulum sebagai — *Those experience of the child which the school in any way utilizes attempts to influence*.

Ketiga, kurikulum sebagai rencana atau program pelajaran. Pendapat itu tergambar dalam definisi yang dikemukakan oleh Hilda Taba. *A curriculum is a plan for learning; therefore, what is known about the learning process and the development of the individual has bearing on the shaping of a curriculum*.<sup>4</sup> Hal itu tergambar pula dalam pengertian kurikulum pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 Bab I Pasal 1 ayat 19 yang mengartikan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

<sup>3</sup>C. E. Beeby, *Pendidikan di Indonesia: Penilaian dan Pedoman Perencanaan*, (Jakarta: LP3ES, 1992), h. 145.

<sup>4</sup>Lihat Wina Sanjaya, *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Jakarta: Rancana, 2006), h. 3-5.

Sebelum kemerdekaan, kurikulum pendidikan di Indonesia masih bercorak kolonial. Pada masa penjajahan Belanda, pendidikan Islam tidak mendapat perhatian bahkan dijaui oleh pemerintah kolonial. Inspektur Pendidikan Pribumi yang pertama J. A. Van Der Chijs berpendapat bahwa kebiasaan pribumi membaca teks tulisan Arab adalah kebiasaan jelek sehingga tidak dapat dipakai dalam sekolah pribumi.<sup>3</sup> Pemerintah kolonial juga menolak memberikan subsidi kepada sekolah Islam karena mereka menganggap sekolah Islam tidak menguntungkan bagi pengaruh dan kewibawaan mereka.<sup>4</sup> Kebijakan kolonial yang cenderung tidak berpihak kepada pendidikan Islam itulah yang turut mendorong lahirnya lembaga pendidikan Islam selain pesantren yang telah lahir lebih dulu.

Di Minangkabau, berkembang Madrasah Adabiah yang didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad (1915). Di situ juga didirikan Madrasah Diniyah (1915) oleh Zainuddin Labay el-Yunus. Perkumpulan Sumatera Thawalib juga mendirikan sekolah-sekolah di wilayah Minangkabau, Sumatera Barat. Demikian pula perkumpulan Jamiat Khair, Al-Irsyad, Persyarikatan Ulama, Jamiatul Washliyah, Muhammadiyah, Persatuan Islam, dan Nahdlatul Ulama mendirikan lembaga pendidikan masing-masing. Lembaga-lembaga pendidikan tersebut mempunyai corak yang beragam sesuai dengan kebijakan organisasi.

<sup>3</sup>Karel A. Steenbrink, *Pesantren Modern: Kelahiran Pendidikan Islam dalam Runtuhnya Modern (Jakarta: I.PJES, 1994), h.3.*

<sup>4</sup>*Ibid.*, h.6.

Setelah kemerdekaan, pemerintah kepada pendudukan tampak setelah orde baru. Kurikulum madrasah yang pertama diberlakukan secara nasional dikenal dengan istilah kurikulum 1973. Dari struktur materi yang ditawarkan, kurikulum itu sudah cukup mencerminkan perkembangan yang serius dalam rangka mengarahkan madrasah sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional. Komponen-komponen kurikulum 1973 tidak saja meliputi mata pelajaran agama tetapi juga mata pelajaran umum dan mata pelajaran kejuruan.

Kurikulum 1973 kemudian disempurnakan pada tahun 1976. Kurikulum itu merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (SKB). Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. SKB ini menegaskan kesamaan posisi madrasah dan sekolah. Kurikulum ini kemudian disempurnakan lagi pada tahun 1984.

Tahun 1994 dapat disebut sebagai periode penting perkembangan madrasah di Indonesia. Pada tahun itu diberlakukan kurikulum baru yang dikenal dengan kurikulum 1994. Kurikulum 1994 mengharuskan madrasah untuk memasukkan semua pelajaran umum sebagaimana di sekolah-sekolah umum.

Kurikulum 1994 kemudian disempurnakan kembali pada tahun 2004. Kurikulum 2004 dikenal sebagai Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Karakteristik utama KBK adalah pertama, kompetensi dasar yang harus dicapai. Melalui KBK peserta didik diharapkan memiliki

## 2. Tipologi Pemikiran di Kalimantan Selatan

Dalam bab terdahulu telah digambarkan pandangan-pandangan tentang kurikulum dan guru. Pada dasarnya mereka berpendapat bahwa kurikulum semestinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa mengabaikan kondisi dan nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia. Selain itu, kurikulum harus sesuai dengan tuntutan lokal.

Dari pandangan-pandangan itu tampak sekali pemikiran yang berkembang cenderung ke arah pragmatis rasional. Beberapa pendapat menguatkan dugaan itu. Akhtiar Hamdi (2001) beranggapan bahwa dalam pendidikan harus seimbang antara pendidikan keagamaan dengan pendidikan ilmu umum.<sup>67</sup> Aliman Syahrani (2002) lebih jelas mengarah ke arah tipologi pragmatia. Menurutnya, bahan-bahan kajian yang dikuliahkan di pesantren sebenarnya sudah banyak yang "hati" bila dihadapkan dengan tuntutan zaman seperti dewasa ini. Aliman menghendaki kurikulum harus sesuai dengan tuntutan zaman dan kemajuan teknologi sehingga santri dapat juga berbicara banyak tentang ilmu pengetahuan terkini.<sup>68</sup>

Marwarni dan Hafiz juga dapat digolong dalam pemikir pragmatia. Sekolah Islam tidak hanya mengajarkan agama tetapi juga penguasaan iptek karenanya penerapan pendidikan iptek dan imtaq menjadi sesuatu

<sup>67</sup>Akhtiar Hamdi, "Pendidikan Moral Salah Satu Sasaran Pendidikan Nasional", *Kalimantan Post*, 21 Juni 2001, h.4.

<sup>68</sup>Aliman Syahrani, "Pesantren Vs Barat", *Kalimantan Post* 1 Februari 2002, h.4.

yang penting untuk diterapkan.<sup>68</sup> Kurikulum, menurut Marwani, semestinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa mengabaikan kondisi dan nilai-nilai yang dianut bangsa Indonesia.<sup>69</sup>

Dalam konteks kurikulum pula, Syaifuddin menilai pengembangan kurikulum semestinya diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota. Wewenang itu, tampaknya, terkait dengan anggapannya bahwa kurikulum harus sesuai dengan tuntutan kontekstual lokal.<sup>70</sup> Oleh karena itulah dapat pula dikatakan pragmatisme juga mempengaruhi pemikiran-pemikiran tersebut. Pandangan lain tampaknya sangat jelas berpijak kepada pragmatisme. Alfian melihat kurikulum harus mampu menumbuhkan kreativitas dan sikap mandiri.<sup>71</sup>

Beberapa pendapat memang ada yang cenderung untuk mementingkan akhlak. Atau tetapi, moral, akhlak atau budi pekerti hanya satu bagian dari sebuah pendidikan. Mereka tetap berpendapat itu harus pula dibarengi dengan kemampuan membaca alam sekitar untuk menghadapi tantangan zaman.<sup>72</sup>

<sup>68</sup>Hafiz Al Ansyari, "Mencari Sistem Pendidikan yang Relevan", *Kalimantan Post*, 20 Maret 2004, h.4.

<sup>69</sup>Muhammad Marwani, "Kurikulum Masa Depan SLTP dan SMU/SMK dengan Berbasis Kompetensi Dasar", *Kalimantan Post*, 16 Februari 2003, h.4. Lihat A. Gazali, "Sistem Pendidikan dalam di Ahad Kesatuan", *Banjarmasin Post*, 29 September 2000, h.7.

<sup>70</sup>Syaifuddin Sabda, "Paradigma Pengelolaan Pendidikan dalam Perspektif Desentralisasi", *Banjarmasin Post*, 3 Mei 2000, h.7.

<sup>71</sup>Alfian, "Mendobrak Dogmatisme Pendidikan", *Kalimantan Post*, 24 April 2004, h.4.

<sup>72</sup>Lihat Syakrani, "Memuliakan Guru", *Kalimantan Post*, 3 Juni 2003, h.4.

Dengan demikian, pemikiran pragmatis mode Ibnu Khaldun sangat dominan dalam pemikiran pendidikan di Kalimantan Selatan. Di samping itu, tidak ada satu pun pemikiran yang ke arah konservatif atau religius rasional. Pemikiran yang menganggap pendidikan umum tidak penting (konservatif) tidak muncul. Demikian pula halnya dengan pemikiran religius rasional yang tidak menekankan fungsi dan kemanfaatan dari sebuah ilmu sehingga semua ilmu perlu diajarkan dalam lembaga pendidikan.

Jika melihat dari pandangan tentang guru dan corak pragmatisme sangat jelas. Semua tulisan yang dikemukakan sangat mementingkan kesejahteraan guru dan kualitas guru. Bagi mereka guru semestinya memperoleh penghasilan yang cukup dan memiliki kemampuan dalam mendidik.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan**

#### **1. Pemikiran yang Muncul**

Studi ini telah menunjukkan bahwa pemikiran pendidikan yang muncul dalam media koran di Kalimantan dapat dikelompokkan dalam klasifikasi orientasi pendidikan, tanggung jawab pendidikan, kurikulum, dan guru.

Orientasi pendidikan terungkap dalam studi ini meliputi pendidikan hudi pekerti, mencetak pemimpin dan memberdayakan, relevansi dengan dunia usaha, zaman, dan lokal, serta pendidikan keluarga.

Pemikiran yang lain menyorot mengenai tanggung jawab pendidikan. Seperti pendapat yang sudah jama'ah terdengar, tanggung jawab pendidikan tidak hanya berada pada pemerintah tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat dalam hal ini termasuk siswa, guru, kepala sekolah, LSM, dewan sekolah, dunia usaha, tokoh masyarakat, wakil rakyat, dan dunia pers.

Khusus mengenai kurikulum yang merupakan fokus studi ini terungkap bahwa kurikulum terutama kurikulum pendidikan Islam masih perlu dibenahi dengan melihat kondisi dan kebutuhan masyarakat, terutama dalam materi pelajaran. Hal itu terkait dengan masih adanya dikotomi dalam pendidikan.

Dalam diskusi mengenai guru, tulisan-tulisan di media mayoritas menyorot mengenai kualitas guru dan kesejahteraan guru. Kualitas dan kesejahteraan guru

yang relatif rendah dianggap punya pengaruh yang signifikan dalam pendidikan terutama terhadap cara guru dalam mengajar.

## 2. Tipologi

Pemikiran-pemikiran yang dominan muncul di Kalimantan Selatan menunjukkan lebih cenderung kepada tipologi pragmatis model Ibn Khaldun. Karakteristik paling jelas dari tipologi ini adalah pemikiran yang lebih melihat pendidikan dari sudut pandang kepentingan praktis dalam kehidupan. Pendidikan diarahkan kepada keperluan peserta didik sesuai dengan situasi di mana dan kapan dia berada. Namun, pada sisi lain, persoalan akhlak, moral, etika, dan budi pekerti juga menjadi sorotan.

## B. Saran

Meskipun telah mencoba membuat tipologi, studi semacam ini masih perlu dilanjutkan yang bersumber dari objek yang lain misalnya buku, tradisi lisan, dan praktik pendidikan di Kalimantan Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhdi, "Ehtanas SMU Perlu Ditinjau Kembali", *Banguesman Post*, 1 Februari 2000
- Aina, Melissa Nur, "Keterbatasan Eksperimen Pendidikan", *Kalimantan Post*, 1 September 2004
- Akhtiar Hamdi, "Pendidikan Moral Salah Satu Sasaran Pendidikan Nasional", *Kalimantan Post*, 21 Juni 2001
- Al Ansyari, Hapiz, "Mencari Sistem Pendidikan yang Relevan", *Kalimantan Post*, 20 Maret 2004
- Al Ansyari, Hapiz, "Mencari Sistem Pendidikan yang Relevan", *Kalimantan Post*, 20 Maret 2004
- Al Ghazali, *Minhaj al .Abidin*, penj. Abdul Hiyadd. (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995)
- Al Jumbulati, Ali dan Aboul Futeh At Tuwanisi, *Perbandingan Pendidikan Islam*, penj. M. Arifin. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Al Nahlawi, Abdurrahman, *Ushul al Tarbiyah al Islamiyy wa Andilihihi fi hayti wa al madrasah wa al mujtama'* (Dar Fikr, Damaskus 1979) Cet. I.
- Alfian, "Mendobrak Dogmatisme Pendidikan, *Kalimantan Post*, 24 April 2004
- Al-Ghifari, Abu, *Kiat Menjadi Penulis Sukses*. (Bandung: Mujahid Press, 2003)
- Ali, A. Mukti, *Memahami Beberapa Aspek Ajaran Islam* (Bandung: Mizan, 1991)
- Ardhana, Sutisman Eka, *Jurnalistik Dakwah*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995)
- Arief Hakim, M. *Eht Menulis Artikel di Media Cetak*. (Bandung: Yayasan Nuansa Cendikia, 2001)
- Arifin, Mansur, "Pendidikan Anak dalam Surah Luqman", *Kalimantan Post*, 21 Maret 2002

Arraiyah, Hamdar, *Melacak Berita Keagamaan di Media Massa dalam Warta Beragama*, Volume II, Nomor 1 April-Juni 2005, (Jakarta: Puslitang Kehidupan Beragama, 2005)

Al Taamy Al Syabany Umar Muhammad, *Al Fikru Al Tarbiyy Bayna Al Nazhariyyah wa Al Ta'biq*, (Tripoli, 11h)

Bedjo, "Pergeseran Pendidikan Moral di Sekolah", *Banjarmasin Post*, 8 Februari 2003

Beeby, C.E. *Pendidikan di Indonesia Penilaian dan Pedoman Perencanaan*, (Jakarta: LP3ES, 1992)

Budiman, Alipir, "Benahi Kurikulum Madrasah Tsanawiyah", *Kalimantan Post*, 26 September 2000

Budiman, Alipir, "Benahi Kurikulum Madrasah Tsanawiyah", *Kalimantan Post*, 26 September 2000

Budiman, Alipir, "Benahi Kurikulum Madrasah Tsanawiyah", *Kalimantan Post*, (Banjarmasin), 26 September 2000

Buseri, Kamrani, *Antologi Pendidikan Islam dan Dakwah Pemikiran Teoritis Praktis Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2003)

Daradjat, Zakiah, *Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ruhama, 1995)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999)

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989)

Dhoifer, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1994)

Dirjen Pendidikan Islam, *Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan*, (Dirjen Pendis, Jakarta : 2006)

Echols, John M dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris - Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), Cet. X

Fadillah, Haris, "Pendidikan Tanggung Jawab Siapa?", *Banjarmasin Post*, 10 September 2001

Fahriansyah, "Tema Artikel Keagamaan Media Massa Lokal di Kalimantan Selatan", Hasil Penelitian, (Banjarmasin: Pusat Penelitian IAIN Antasari, 1998)

Faisal, Umar, "Peranan Pendidikan Bagi Anak", *Kalimantan Post*, 22 Juli 2003.

Firdaus, M. Yunus, Pendidikan Berbasis Realitas Sosial Paulo Freire dan Y.B. Mangunwijaya, (Yogyakarta: Logong Pustaka, 2004), h. 98-99

Freire, Paulo *Politik Pendidikan, Kebudayaan, Kekuasaan, dan Penbrebusan*, Penj. Agung Prihantoro dan Agung Arif Fudiyartanto, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002)

Gazali Rahman, "Sistem Pendidikan Kita Segera Diperbaharui", *Banjarmasin Post*, 17 September 2002

Gazali, A. "Sistem Pendidikan Islam di Abad Keenasan", *Banjarmasin Post*, 29 September 2000

Hadjar, Ibnu, Pendekatan Holistik dalam Pendidikan Islam (Sebuah Upaya untuk Efektivitas Pelaksanaan Kurikulum), dalam *Paradigma Pendidikan Islam*, Ismail, Nurul Huda, Abdul Khaliq (ed.), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001)

Haira, M. Syarbani "Isu Agama dalam Kampanye Pemilu 1997: Analisis Isi Surat Kabar di Banjarmasin", Hasil Penelitian, (Banjarmasin, Pusat Penelitian: 1997)

Hamdani, "Pengembangan Profesi Guru", *Banjarmasin Post*, 29 Oktober 2001

Hamdi, Akhtiar, "Pendidikan Moral Salah Satu Sasaran Pendidikan Nasional", *Kalimantan Post*, 21 Juni 2001

Hamid, Abdul, "Bagaimana Upaya Peningkatan Mutu Guru", *Banjarmasin Post*, 8 September 2004

Hamid, Abdul, "Program Budgeting Meningkatkan Mutu Pendidikan", *Banjarmasin Post*, 30 September 2004

Hasan, M.Ali dan Mukti Ali, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2003)

Hatmansyah, "Pendidikan Kita Terjebak Kapitalisme", *Banjarmasin Post*, 10 November 2002

- Hermira, Dina, "Demokrasi dan Pendidikan", *Banjarmasin Post*, 26 April 2000,
- Ikhrom, "Dikotomi Sistem Pendidikan Islam (Upaya mengungkap sebab-sebab dan penyelesaiannya)", dalam Abdurrahman Mas'ad dkk, *Paradigma Pendidikan Islam* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar : 2001)
- Jamaluddin, "Mengangkat Kembali Citra Profesi Guru", *Banjarmasin Post*, 24 Agustus 2000
- Joko Susilo, Muhammad, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan: Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) Cet. I
- Kisworo, Edi, "Pendidikan Tanggung Jawab Bersama", *Banjarmasin Post*, 15 September 2001
- Kurnain MG, A, "Pendidikan Imtiq Kapan Dimulai", *Kalimantan Post*, 30 April 2004
- Kusnawan, Aep, *Herdekuh Lewat Tuisan*, (Bandung: Mujahid Press, 2004).
- M. Jawwad Ridla, Tiga Aliran Utama Teori Pendidikan Islam, Perspektif Sosiologis - Filosofis, Penj. Mahmud Arif, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2002), Cet. II
- Maksum, *Madrasah : Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Logos, 1999)
- Mangunwijaya, Y.B, *Impian dari Yogyakarta* (Jakarta: Kompas, 2003), St. Sularto (ed)
- Maya Mariati, "Syariat Islam dalam Kebijakan Pendidikan", *Kalimantan Post*, 10 Agustus 2002
- Marwani, Muhammad, "Kurikulum Masa Depan dengan Empat Pilar Pendidikan Kesejagatan", *Kalimantan Post*, 8 Juli 2002
- Marwani, Muhammad, "Kurikulum Masa Depan SLTP dan SMU/SMK dengan Berbasis Kompetensi Dasar", *Kalimantan Post*, 16 Februari 2002
- Marwani, Muhammad, "Pendidikan Humanistik Perlu Mewarnai Pembelajaran di Sekolah", *Kalimantan Post*, 21 Mei 2002
- Marwani, Muhammad, "Peningkatan Kemampuan Profesi Guru Meningkatkan Mutu SDM", *Banjarmasin Post*, 27 April 2000

- Masrorah, Hanun, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta, Logos, 1999)
- Masykuri, H. "Karir Guru yang Kelabu", *Kalimantan Post*, 14 Juli 2004, h. 4
- Mawarni, Muhammad, Peningkatan Kemampuan Profesi Guru Meningkatkan Mutu SDM. *Banjarmasin Post* (Banjarmasin), 27 April 2000
- Meulemen, Johan Henrik, "IAIN di Persimpangan Jalan" dalam Komaruddin Hidayat dan Hendro Prasetyo (ed), *Problem dan Prospek IAIN Antologi Pendidikan Tinggi Islam*, (Jakarta: Ditperta, 2000)
- Muhadjir, Noeng "Pendidikan Islam untuk Masa Depan Kemungkinan" dalam Kamrani Buseri dkl. (ed), *Nahdlatul Pendidikan Islam Kapun Teraikan dan Antisipatif Abad XXI*, (Banjarmasin: IAIN Antasari, 1997)
- Muhadjir, Noeng, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial Suatu Teori Pendidikan*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1987)
- Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, (Pustaka Pelajar: Yogyakarta, 2003)
- Mustafa, Adi Junjangan, dalam Blog Firman Pribadi, <http://www.pribadi.or.id>
- Nasrullah, Jamaluddin, "Pendidikan di Era Otonomi Daerah", *Kalimantan Post*, 6 Maret 2002
- Nurdin, Muhammad, "Dua Tahun Pendidikan dalam Kerangka Otonomi Daerah", *Banjarmasin Post*, 14 Oktober 2002
- Nuridin, Syafruddin, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum*, (Jakarta: LP3ES, 2005)
- Nuwairah, Nahed, "Pembangunan Pendidikan Nasional", *Banjarmasin Post*, 16 Juni 2004
- Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional, *Kurikulum Berbasis Kompetensi Kebijakan Umum Pendidikan Dasar dan Menengah*, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2001)
- Rahadi, Suko, "Kurikulum Berbasis Kompetensi", <http://www.puskur.or.id> /23/07/2006
- Rahman, Gazali, "Pendidikan Keluarga, Perlukan Disiplin (Refleksi Memperingati Hari Keluarga Nasional)", *Kalimantan Post*, 26 Juni 2004

- Rahmi, Rahayu, "Darwinisme dalam Pendidikan Formal", *Banjarmasin Post*, 10 Juni 2004
- Ramayulis, *Metamorfologi Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta, Kalam Mulus, 2005)
- Ridha, Muhammad, "Pendidikan dalam Perspektif Pemberdayaan", *Banjarmasin Post*, 2 Juni 2004
- Sabda, Syaifuddin, "Paradigma Pengelolaan Pendidikan dalam Perpektif Desentralisasi", *Banjarmasin Post*, 3 Mei 2000
- Sabda, Syaifuddin, "Paradigma Pengelolaan Pendidikan dalam Perpektif Desentralisasi", *Banjarmasin Post*, 3 Mei 2000
- Sabda, Syaifuddin, "Revolusi Pendidikan, Mengapa Tidak?", *Banjarmasin Post*, 2 November 2000
- Sakdiah, Halimatus, "Implikasi Pendidikan terhadap Perkembangan Jiwa Keagamaan Anak", *Kalimantan Post*, 14 Juli 2002
- Samantho, Ahmad Y, *Jurnalistik Islam: Panduan Praktis bagi Para Aktivis Muslim* (Jakarta: Harakah, 2002)
- Sanjaya, Wina, *Penbelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Santoso, Soegeng, "Pendidikan Anak Usia Dini dan Karakter Bangsa", *Banjarmasin Post*, 9 Oktober 2002
- Saylor, J. Gallen, W.M. Alexander, Arthur J. Lewis, *Curriculum Planning For Better Teaching and Learning*, (Japan: Holt-Saunders), h. 4-7
- Serverin, Werner J. James W. Tankard Jr. Teori Komunikasi, Vincent Lowe, Abdullah bin Hasan (penj), (Dewan Bahasa dan Pustaka, Selangor: 1988)
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Alquran*, (Bandung: Mizan, 2003)
- Steenbrink, Karel A, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern* (Jakarta: LP3ES, 1986), Cet. II
- Steenbrink, Karel A. *Pesantren Madrasah Sekolah Pendidikan Islam dalam Kurun Modern*, (Jakarta: LP3ES, 1994)
- Subhi, Chairun, "Profil Guru di Era Otonomi Sekolah", *Kalimantan Post*, 8 April 2004

- Sugianto, "Pendidikan Budi Pekerti", *Banjarmasin Post*, 21 Desember 2001.
- Suprianto, "Membangun Profesi Guru yang Sedang Tergadai", *Kalimantan Post*.
- Surya, Muhammad, *Percikan Perjuangan Guru*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2002).
- Sutikno, "Tuntunan Profesionalisme Guru dalam Menyongsong KBK", *Kalimantan Post*, 23 Nopember 2002
- Syafruddin, Didin, "Meninjau Keberadaan Fakultas Tarbiyah", dalam Komaruddin Hidayat dan Hendro Prasetyo (ed), *Problem dan Prospek IAIN Antologi Pendidikan Tinggi Islam*, (Jakarta: Ditperta, 2000)
- Syahrani, Aliman, "Perantren Vs Baras", *Kalimantan Post*, 1 Februari 2002, h.4
- Syahrani, Aliman. *Rekayasa Media Massa*, *Kalimantan Post*, 9 Januari 2002
- Syahrani, "Memuliakan Guru", *Kalimantan Post*, 7 Juni 2002
- Syamsul Asep, M. Rendi, *Jurnalistik Praktis untuk Pemula*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005)
- Syarkawi, Hasani, "Guru Sejahtera, SDM Mahal", *Kalimantan Post*, 28 Maret 2002
- Syuhud, A. Fatih, *Diperlukan Pendidikan Pencetak Pemimpin*, *Banjarmasin Post*, 2 Juni 2004
- Thaib, Abdullah, "Menjadi Guru yang Efektif dan Kreatif", *Banjarmasin Post*, 17 September 2002
- Tibi, Bassam, *Islam and The Cultural Accommodation of Social Change*, (Colorado: Westview Press, 1990)
- Tilaar, H.A.R. *Membenahi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- W. Littlejohn, Stephen, *Theories of Human Communication*, (New York, Lth.), Fifth Edition)
- Wahyu, "Rapor Pers di Kalimantan Selatan dalam Menuju Pers yang Profesional", *Makalah Seminar*, disajikan pada seminar "Mendorong Peran Masyarakat dalam Mengkritisi Kehidupan Pers yang Profesional", dalam rangka Peringatan Hari Pers Nasional (HPN), tanggal 21 Maret 2006, di Banjarmasin

Watik Pratikya, Ahmad, "Identifikasi Masalah Pendidikan Agama Islam di Indonesia", dalam Muliha Uta (ed.), *Pendidikan Islam di Indonesia: Antara Cita dan Fakta*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991)

Wirjosukarto, Amir Hamzah, *Pembaharuan Pendidikan dan Pengajaran Islam* (Jember: Muliha Offset, 1985), Cet. IV

Yunus, Achmad "Pengembangan Kreativitas Melalui Proses Belajar Mengajar", *Kalimantan Post*, 2 Oktober 2000

Yusransyah, Muhammad, "Terpuruknya Profesi Guru di Mata Masyarakat", *Kalimantan Post*, 8 Januari 2002